

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- : 19  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 21 Juni 2021  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 9 Juni 2021  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua  
Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV  
DPR RI)  
Hadir : A. 41 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. (Menteri  
Pertanian);  
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman  
Pangan sekaligus Plt. Inspektur Jenderal  
Kementerian Pertanian);  
3. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal  
Hortikultura Kementerian Pertanian);  
4. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian  
Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal  
Perkebunan Kementerian Pertanian);  
5. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan  
Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
Kementerian Pertanian);  
6. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
Pertanian Kementerian Pertanian);  
7. Dr. Ir. Agung Hendriadi M. Eng. (Kepala Badan  
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);  
8. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina  
Pertanian Kementerian Pertanian);

9. drh. Makmun, M.Sc. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
10. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*;
11. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
12. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero);
13. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero); dan
14. Frans Marganda Tambunan, Kuasa Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 9 Juni 2021, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja, program dan anggaran tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp14.510.592.752.000,00 (empat belas triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2022 untuk masing-masing Eselon I sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan penambahan anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2022.
2. Komisi IV DPR RI memberikan evaluasi berdasarkan pertimbangan bahwa realisasi TA 2021 sangat rendah dan berpotensi terjadi *carry over* ke TA 2022, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran di TA 2022. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan antara lain sebagai berikut:
  - a. Kementerian Pertanian segera melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran 2021 dan menyelesaikan CPCL paling lambat bulan Juli 2021;

- b. Kementerian Pertanian tidak menggunakan anggaran belanja tahun 2022 untuk membayar kegiatan yang merupakan luncturan/*carry over* TA 2021; dan
  - c. Kementerian Pertanian agar memberikan sanksi kepada pejabat Eselon I dan Eselon II atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali program dan kegiatan reguler yang juga terdapat pada kegiatan DAK sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan mendukung Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan anggaran DAK, dalam rangka penguatan infrastuktur hilirisasi pertanian.
  4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis sehubungan dengan adanya penambahan anggaran melalui ABT dan masih rendahnya penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021, terutama pada Direktorat Jenderal teknis yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan refocusing kegiatan dan rePalokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak bejalan tidak sesuai target di akhir bulan Agustus 2021.
  5. Komisi IV DPR RI mengkritisi program *Food Estate* yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas program *Food Estate* paling lambat di akhir bulan Agustus tahun 2021 untuk kemudian akan dibahas kembali.
  6. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Pertanian c.q Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan inovasi dalam menghasilkan teknologi tepat guna dan dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain untuk mengatasi stunting.
  7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara kebijakan rayonisasi PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* sepanjang tidak ada penambahan biaya operasional, lebih efisien, dan tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah pupuk subsidi yang disalurkan, dan kemudian akan diputuskan pada rapat kerja berikutnya.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek *After Sales Service* dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen, antara lain dalam bentuk bengkel berjalan maupun menghadirkan pemasok pada saat kegiatan bimbingan teknis maupun sosialisasi.
9. Komisi IV DPR RI mengkritisasi program/kegiatan rantai dingin berupa *cold storage* pada tahun Anggaran 2021. Mengingat evaluasi terhadap kegiatan serupa di tahun 2020 pemanfaatannya belum optimal, maka pengadaan *cold storage* di tahun 2021 dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi petani, dukungan perbenihan, dan atau penyediaan sarana pengolahan dan pascapanen lainnya.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2022 harus berdampak langsung kepada petani dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan daftar komoditas prioritas yang akan dikembangkan, beserta prioritas program kerja per Eselon I secara rinci.
11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN pangan pokok.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

**Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151